



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

JL. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat

Jakarta, 28 Februari 2019

Nomor : 232/DJU/HM.02.3/2/2019
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Perintah untuk melaksanakan
Register Elektronik pada
pengadilan

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
(daftar terlampir)
di
Tempat

Sehubungan dengan surat kami Nomor 1153/DJU/.HM02.3/12/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang penerapan register elektronik pada pengadilan, yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus)/tahun diwajibkan menerapkan register elektronik per 1 Maret 2019.

Pelaksanaan register elektronik selama 1(satu) tahun (terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020) merupakan masa transisi, untuk itu pengadilan-pengadilan sebagaimana daftar terlampir masih tetap mengisi data perkara pada **register induk** yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk memberikan izin sepenuhnya meninggalkan register manual.

Perlu diketahui bahwa kepatuhan melaksanakan register elektronik pada pengadilan menjadi salah satu penilaian dan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan dalam proses promosi dan mutasi.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



HERRI SWANTORO

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.
4. Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi.

Lampiran Perintah untuk melaksanakan
 Register Elektronik pada pengadilan
 Nomor : 232/DJU/HM.02.3/2/2019
 Tanggal : 28 Februari 2019

LIST PENGADILAN NEGERI DENGAN JUMLAH PERKARA DIBAWAH 200

NO.	PENGADILAN
PT. BANDA ACEH	
1	PENGADILAN NEGERI SINABANG
2	PENGADILAN NEGERI CALANG
3	PENGADILAN NEGERI SABANG
4	PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN
5	PENGADILAN NEGERI SINGKIL
6	PENGADILAN NEGERI TAKENGON
7	PENGADILAN NEGERI SUKA MAKMUE
8	PENGADILAN NEGERI SIMPANG TIGA REDELONG
9	PENGADILAN NEGERI BLANGPIDIE
10	PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
PT. KUPANG	
1	PENGADILAN NEGERI LEMBATA
2	PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO
3	PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
4	PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
5	PENGADILAN NEGERI LARANTUKA
6	PENGADILAN NEGERI ENDE
7	PENGADILAN NEGERI KALABAHI
8	PENGADILAN NEGERI RUTENG
9	PENGADILAN NEGERI BAJAWA
PT. BENGKULU	
1	PENGADILAN NEGERI TUBEI
2	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN
3	PENGADILAN NEGERI TAIS
4	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG
5	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO
PT. PADANG	
1	PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG
2	PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING
3	PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO
4	PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI
5	PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
PT. JAWA TIMUR	
1	PENGADILAN NEGERI PACITAN
PT. MAKASAR	
1	PENGADILAN NEGERI MAJENE
2	PENGADILAN NEGERI SELAYAR
3	PENGADILAN NEGERI BELOPA
4	PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU
PT. JAMBI	
1	PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

PT. GORONTALO	
1	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
2	PENGADILAN NEGERI MARISA
PT. PALANGKARAYA	
1	PENGADILAN NEGERI BUNTOK
2	PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
3	PENGADILAN NEGERI KUALA KURUN
4	PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU
5	PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK
PT. JAYAPURA	
1	PENGADILAN NEGERI FAK FAK
2	PENGADILAN NEGERI WAMENA
3	PENGADILAN NEGERI SERUI
4	PENGADILAN NEGERI KAIMANA
PT. PALU	
1	PENGADILAN NEGERI BUOL
PT. KENDARI	
1	PENGADILAN NEGERI ANDOOLO
2	PENGADILAN NEGERI LASUSUA
3	PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI
PT. AMBON	
1	PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
2	PENGADILAN NEGERI DOBO
3	PENGADILAN NEGERI NAMLEA
4	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU
5	PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIMOA
6	PENGADILAN NEGERI TUAL
PT MANADO	
1	PENGADILAN NEGERI MELONGUANE
PT. SAMARINDA	
1	PENGADILAN NEGERI MALINAU
2	PENGADILAN NEGERI PENAJAM
PT. PEKANBARU	
1	PENGADILAN NEGERI RANAI
2	PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN
PT. MALUKU UTARA	
1	PENGADILAN NEGERI SANANA
2	PENGADILAN NEGERI BOBONG
PT. MEDAN	
1	PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN
2	PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH
PT. TANJUNG KARANG	
1	PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN
PT. BANGKA BELITUNG	
1	PENGADILAN NEGERI Koba
2	PENGADILAN NEGERI MENTOK
PT. BANJARMASIN	
1	PENGADILAN NEGERI PARINGIN
PT. PALEMBANG	
1	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI